

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

---

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada era keterbukaan dan pada situasi krisis multi dimensi seperti saat ini, masyarakat selaku *stakeholder* pemerintah daerah semakin menuntut aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perkembangan sosial ekonomi, pelayanan yang akuntabilitas, transparan dan aspiratif serta situasi lingkungan yang aman dan tertib merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan dalam rangka akselerasi pemberdayaan masyarakat disegala bidang. Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja yang bertugas mengkoordinasikan dan menangani permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kampar, selama tahun 2018 ini sesuai tugas pokok dan fungsinya telah berupaya memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat dengan tetap memperhatikan hal-hal prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat.

## B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sebagaimana daftar berikut :

a. Daftar Susunan Kepegawaian :

No	Pangkat/Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	D3 (org)	S1 (org)	S2 (org)	Ket
1	Pembina Tk I (IV/b)	-	-	-	-	1	-	
2	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	1	
3	Penata Tk. I (III/d)	-	-	-	-	3	-	
4	Penata (III/c)	-	-	-	-	1	-	
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-	-	1	-	

6	Penata Muda (III/a)	-	-	1	-	1	-	
7	Pengatur (II/c)	-	-	3	-	-	-	
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	4	-	8	1	13

## b. Daftar Barang Perlengkapan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Komputer	7 unit	7	-	
2	Laptop	5 unit	5	-	
3	Printer	8 unit	8	-	
4	Lemari Buku	1 unit	1	-	
5	Lemari Arsip	2 unit	2	-	
6	Rak Arsip	2 unit	2	-	
7	Infokus + Layar	1 set	1	-	
8	Kamera	1 unit	1	-	
9	Hendycam	1 unit	1	-	
10	Filling Kabinet	5 unit	5	-	
11	Sofa	1 set	1	-	
12	Meja Kerja Kepala	1 unit	1	-	
13	Meja Kerja Eselon IV	4 unit	4	-	
14	Meja Kerja Staf	17 unit	15	2	
15	Meja Rapat	10 unit	10	-	
16	Kursi Kepala	1 unit	1	-	
17	Kursi Esselon IV	4 unit	4	-	
18	Kursi Staf	10 unit	10	-	
19	Kursi Rapat	10 unit	10	-	
20	Kursi Rapat Pimpinan	2 unit	2	-	
21	Kursi Rapat Staf	20 unit	20	-	
22	AC	6 unit	6	-	
23	Wereless	1 unit	1	-	
24	Televisi	1 unit	1	-	

25	Kendaraan Roda 4	1 unit	1	-	
26	Kendaraan Roda 2	2 unit	2	-	
27	Kursi Tamu	2 unit	2	-	
28	Televisi	2 unit	2	-	

## C. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b. Menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan wawasan kebangsaan ;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- e. Melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila ;
- f. Melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaksanaan Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Bangsa ;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaporan ;
- h. Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

organisasi ;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas nya ;

## **2. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar**

Adapun susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar terdiri dari:

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Kesatuan Bangsa.
- d. Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik.
- e. Seksi Hak Asasi Manusia dan Hubungan Antar Lembaga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP**

Esensi dari sistem LKj adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaran. Atas dasar tersebut, siklus sistem LKj diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja organisasi yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).

LKj memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama LKj merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, LKj merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Dua fungsi utama LKj tersebut merupakan cerminan dari

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj oleh instansi pemerintah.

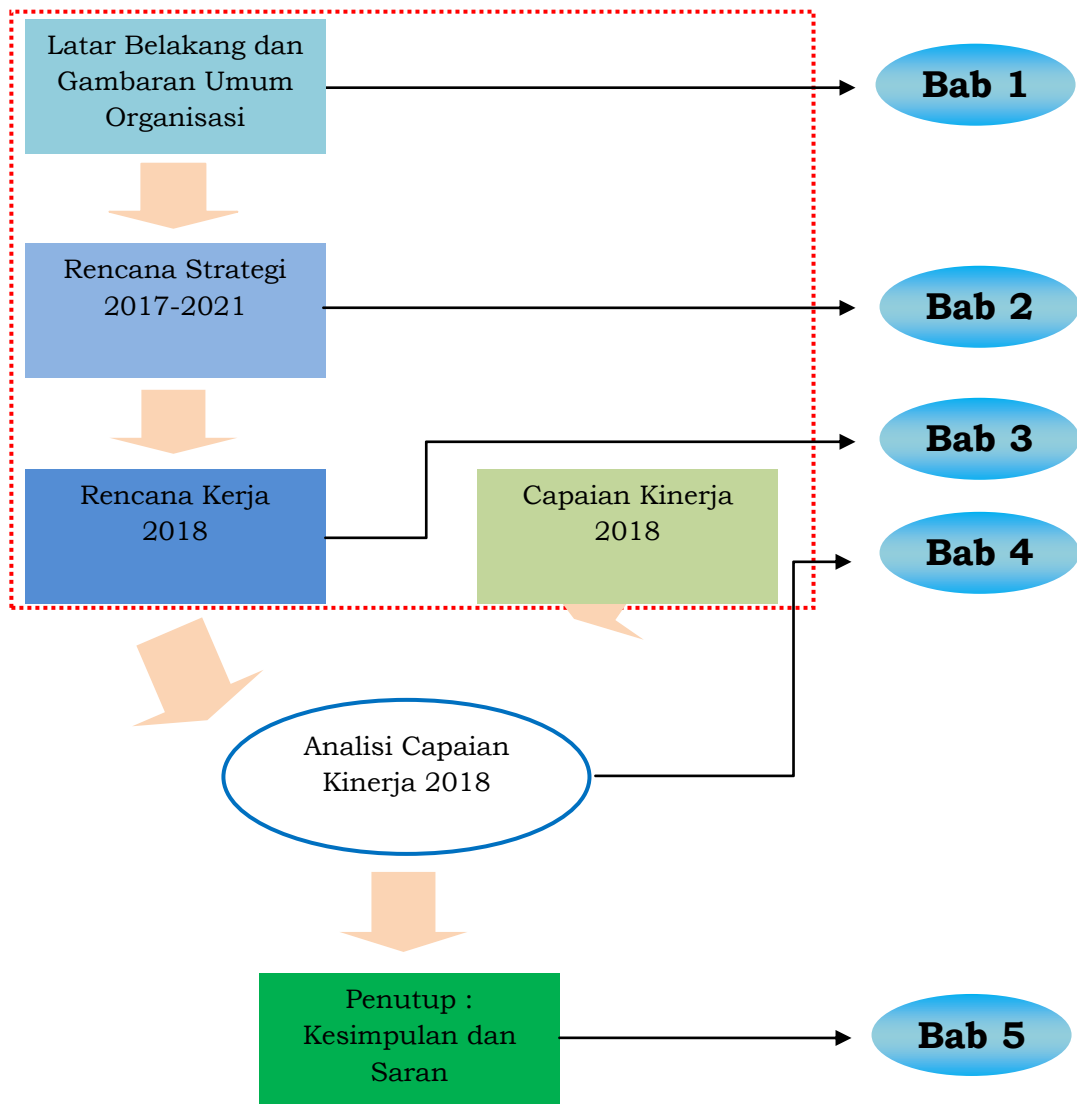
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj mencakup hal-hal berikut ini :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis yang telah dicapai.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap kesenjangan kinerja yang terjadi, organisasi dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

## **E. SISTEMATIKA LKj**

Dalam LKj ini disajikan data pencapaian kinerja (performance results) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dari pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis, sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018, serta kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan partisipatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh instansi/unit lain. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang.

Sistematika penyajian LKj Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2018 ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar LKj Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar 2018

**Uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :**

**Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj 2018.

**Bab II : Rencana Strategis**

Menjelaskan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar untuk periode 2017-2021.

**Bab III : Rencana Kinerja Tahun 2018**

Menjelaskan rencan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar yang ingin dicapai untuk tahun 2018.

**Bab IV : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

**Bab V : Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj tahun 2018 ini dan menguraikan hal-hal yang perlu perbaikan kinerja di masa mendatang.



---

# BAB II

## RENCANA STRATEGIS

---

### A. VISI DAN MISI

---

#### 1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang akan diwujudkan pada tahun 2025 adalah “ ***Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Masyarakat Agamis Tahun 2025*** “.

Untuk mendukung visi Pembangunan Kabupaten Kampar tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mempunyai visi “ ***Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Suasana Yang Kondusif Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Kabupaten Kampar Tahun 2025***”.

#### 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## **B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diimplementasikan melalui kebijakan dan program yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan meliputi :
  - Penyediaan jasa surat menyurat.
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
  - Penyediaan alat tulis kantor.
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor.
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Penyediaan makanan dan minuman.
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
  - Penyediaan jasa Tenaga Harian Lepas.
  - Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan meliputi :
  - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan meliputi :
  - Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset.
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- V. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
- Peningkatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
  - Peningkatan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA).
- VI. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
- Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Bagi Anggota FKDM.
- VII. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
- Peningkatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik.

### **C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “*Upaya pemantapan stabilitas sosial, politik, keamanan dan ketertiban serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan kuat*”.

Dalam upaya pendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan yang menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Kampar dilingkungan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan visi, misi yang sudah ditetapkan, merumuskan pula arah kebijakan sebagai berikut, yaitu :

1. Peningkatan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama serta pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam semangat pembauran guna menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme diseluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan politik yang menopang peran serta masyarakat dalam proses politik dan demokrasi.
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam mengeliminir potensi konflik vertikal dan horizontal yang berskala lokal dan nasional (antar daerah) maupun potensi masalah sebagai akibat kejadian bencana dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat guna mewujudkan suasana yang kondusif.

Kebijakan tersebut diatas selanjutnya dioperasionalkan lebih lanjut dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.

## **BAB III**

# **RENCANA KINERJA TAHUN 2018**

---

Rencana Kerja Tahunan disusun dalam rangka mencapai sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2018. Dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, serta kegiatan rutin dalam rangka mencapai sasaran tahun 2018 yang ditetapkan dan merupakan tahapan pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

➤ **Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

- Indikator : - Tersedianya Jasa surat menyurat.
- Terpenuhinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  - Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai.
  - Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor.
  - Tersedianya peralatan kerja yang baik.
  - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
  - Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan.
  - Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Lancarnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan.
  - Tersedianya makanan dan minuman rapat.
  - Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan konsultasi ke luar daerah.
  - Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas.
  - Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor.

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 900.000,-</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 53.600.000,-</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.100.000,-</li> <li>4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 26.037.900,-</li> <li>5. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 6.200.000,-</li> <li>6. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 31.389.100,-</li> <li>7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 27.108.500,-</li> <li>8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 4.473.000,-</li> <li>9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 24.150.000,-</li> <li>10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.440.000,-</li> <li>11. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar Rp. 7.080.000,-</li> <li>12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 156.670.000,-</li> <li>13. Penyediaan jasa tenaga harian lepas sebesar Rp. 96.525.000,-</li> <li>14. Penyediaan jasa pengamanan kantor sebesar Rp. 65.700.000,-</li> </ol>

➤ **Sasaran 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Indikator : - Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-</li> </ol>

➤ **Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Indikator : -

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
Kegiatan	1. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset dengan anggaran sebesar Rp. 15.600.000,-

➤ **Sasaran 4 : Meningkatkan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.**

Indikator : - Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.  
- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>
Kegiatan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.905.000,- 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar Rp. 3.905.000,-

➤ **Sasaran 5 : Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

Indikator : - Beroperasinya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.  
- Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA).

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>
Kegiatan	1. Peningkatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 67.300.900,- 2. Fasilitasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA), dengan anggaran sebesar Rp. 137.677.400,-

➤ **Sasaran 6 : Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.**

Indikator : - Terlaksananya kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
Kegiatan	1. Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM, dengan anggaran sebesar Rp. 40.927.050,-

➤ **Sasaran 7 : Meningkatkan Pengetahuan Politik Masyarakat.**

Indikator : - Terlaksananya operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik.

Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
Kegiatan	1. Operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik, dengan anggaran sebesar Rp. 27.555.600,-



# BAB IV

## AKUNTABILITAS KINERJA

---

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pada tahun 2018 sesuai dengan program yang telah ditetapkan guna pencapaian Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar ada 7 (tujuh) program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan dari program tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 900.000,- terealisasi Rp. 900.000,- setara dengan 100%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat dengan target kinerja selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya pelaksanaan administrasi kantor, dengan persentase pencapaian 100%.

2. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar Rp. 53.600.000,- terealisasi Rp. 12.907.712,- setara dengan 24,08%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan telepon, air dan listrik dengan target kinerja selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya pelaksanaan administrasi kantor, dengan persentase pencapaian 100%.

3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Rp. 5.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.100.000,- setara dengan 100 %.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya jas dan perlengkapan kantor dengan target kinerja selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil lancarnya penggunaan AC sebagai sarana pendingin ruangan kerja kantor, sehingga persentase pencapaian 100%.

4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rp. 26.037.900,- terealisasi sebesar Rp. 23.637.900,- setara dengan 90,78%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target kinerja selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya pelaksanaan kebersihan kantor, dengan persentase pencapaian 100%.

5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rp. 6.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.400.000,- setara dengan 54,84%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah telaksananya perbaikan peralatan kantor dengan realisasi 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang telah dilaksanakan memberikan hasil tersedianya peralatan kantor (komputer, laptop dan printer) yang siap pakai, dengan persentase pencapaian 100%.

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 31.389.100,- terealisasi sebesar Rp. 24.948.170,- setara dengan 79,48%.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian

setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran, dengan persentase pencapaian 100%.

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan dan yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 27.108.500,- terealisasi sebesar Rp. 21.834.470,- setara dengan 80,54%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya pelayanan administrasi kantor, dengan persentase pencapaian 100%.

8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 4.473.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.473.000,- setara dengan 100%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya pelayanan administrasi kantor, dengan persentase pencapaian 100%.

9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dan yang tersedia pada Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 24.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.310.000,- setara dengan 71,68%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah

dilaksanakan memberikan hasil tambahannya peralatan dan perlengkapan kantor, dengan persentase pencapaian 100%.

10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 7.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.440.000,- setara dengan 100%.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya buku undang-undang, peraturan, Koran dan majalah dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan memberikan hasil meningkatkan pengetahuan pegawai dan lancarnya pelayanan administrasi, dengan persentase pencapaian 100%.

11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 7.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- setara dengan 33,90%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum rapat, harian dan tamu, dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, dengan persentase pencapaian 100%.

12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 156.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.217.173,- setara dengan 99,71%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dalam dan keluar daerah selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya kegiatan koordinasi, dengan persentase pencapaian 100%.

13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga harian lepas, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 96.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.800.000,- setara dengan 88,89%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya jasa tenaga harian lepas, dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa tenaga harian lepas yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, dengan persentase pencapaian 100%.

14. Kegiatan Penyediaan jasa pengaman kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 65.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.700.000,- setara dengan 100%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pengamanan kantor, dengan realisasi selama 12 bulan, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor yang telah dilaksanakan memberikan hasil lancarnya kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, dengan persentase pencapaian 100%.

15. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.923.144,- setara dengan 99,69%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor selama 12 bulan (1 unit), dengan persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan pemeliharaan/ berkala Gedung Kantor yang telah dilaksanakan memberikan hasil terpeliharanya dan tersedianya gedung kantor yang memadai, dengan persentase pencapaian 100%.

16. Kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset,

dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 15.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.600.000,- setara dengan 100%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset dengan realisasi 1 kegiatan, dengan persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset yang telah dilaksanakan memberikan hasil tertatanya pengolahan keuangan dan aset kantor dengan persentase pencapaian 100%.

17. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 3.905.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.915.000,- setara dengan 74,65%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan satuan kerja dengan realisasi 10 buku, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah dilaksanakan memberikan hasil laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan persentase pencapaian 100%.

18. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahaan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 3.905.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.915.000,- setara dengan 74,65%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah laporan keuangan daerah SKPD dengan realisasi 10 buku, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang telah dilaksanakan memberikan hasil laporan akhir tahun, dengan persentase pencapaian 100%.

19. Kegiatan peningkatan tim terpadu penanganan konflik sosial, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) sebesar Rp. 67.300.900,- terealisasi sebesar Rp. 64.900.900,- setara dengan 96,43%.

Indikator kinerja keluaran ini adalah Terlaksananya kegiatan peningkatan tim terpadu penanganan konflik sosial, persentasenya setara dengan 100%

Kegiatan peningkatan tim terpadu penanganan konflik sosial yang telah dilaksanakan memberikan hasil tercovernya gangguan konflik sosial di wilayah kabupaten kampar dengan persentase pencapaian 100%.

20. Kegiatan fasilitasi komunitas intelejen daerah (KOMINDA), dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 137.677.400,- terealisasi sebesar Rp. 134.077.400,- setara dengan 97,39%.

Indikator kinerja keluaran ini adalah Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Kampar dengan berkoordinasi dengan anggota KOMINDA yang terdiri dari unsur Intel Kepolisian, Intel dari TNI, Kejaksaan, BIN dan Instansi terkait lainnya yang pencapaian persentasenya setara dengan 100%

Kegiatan fasilitasi komunitas intelejen daerah (KOMINDA) yang telah dilaksanakan memberikan hasil terkoordinirnya masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Kampar dengan persentase pencapaian 100%.

21. Kegiatan peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 40.927.050,- terealisasi sebesar Rp. 40.327.050,- setara dengan 98,53%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya deteksi dini bagi anggota FKDM dalam mendeteksi dini berbagai bentuk ancaman, dengan realisasi sebanyak 25 orang, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM yang telah dilaksanakan memberikan hasil terciptanya deteksi dini

temu cepat dan lapor diseluruh wilayah di Kabupaten Kampar dengan persentase pencapaian 100%.

22. Kegiatan operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 17.555.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.255.600,- setara dengan 98,29%.

Indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah tertibnya kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik, dengan realisasi sebanyak 11 partai politik, persentase pencapaian setara dengan 100%.

Kegiatan operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik, yang telah dilaksanakan memberikan hasil tertibnya administrasi bantuan partai politik, yang telah dilaksanakan memberikan hasil tertibnya administrasi dalam pemberian bantuan keuangan partao politik, dengan persentase pencapaian 100%.

## **B. EVALUASI KINERJA**

Dari rencana program tahun 2018 yang telah dilaksanakan sasaran yang hendak dicapai terwujudnya kegiatan pengawasan dengan indikator sasaran terlaksananya kegiatan pada 7 (tujuh) program dengan 22 bentuk kegiatan.

### **I. Program Administrasi Perkantoran.Pelayanan.**

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 900.000,- terealisasi Rp. 900.000,- setara dengan 100%.
2. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar Rp. 53.600.000,- terealisasi Rp. 12.907.712,- setara dengan 24,08%.
3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Rp. 5.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.100.000,- setara dengan 100%.



4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rp. 26.037.900,- terealisasi sebesar Rp. 23.637.900,- setara dengan 90,78%.
5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rp. 6.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.400.000,- setara dengan 54,84%.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 31.389.100,- terealisasi sebesar Rp. 24.948.170,- setara dengan 79,48%.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan dan yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 27.108.500,- terealisasi sebesar Rp. 21.834.470,- setara dengan 80,54%.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 4.473.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.473.000,- setara dengan 100%.
9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dan yang tersedia pada Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 24.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.310.000,- setara dengan 71,68%.
10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 7.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.440.000,- setara dengan 100%.
11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 7.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- setara dengan 33,90%.

12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 156.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 156.217.173,- setara dengan 99,71%.
13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga harian lepas, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 96.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.800.000,- setara dengan 88,89%.
14. Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 65.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.700.000,- setara dengan 100%.

## **II. Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur Daerah.**

1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.923.144,- setara dengan 99,69%.

## **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

1. Kegiatan bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset, dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 15.600.000,- terealisasi sebesar 15.600.000,- setara dengan 100%.

## **IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.**

1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi fisik kegiatannya mencapai 100% dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 3.905.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.915.000,- setara dengan 74,65%.
2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, realisasi fisik kegiatannya mencapai 100% dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp.

3.905.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.915.000,- setara dengan 74,65%.

#### **V. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

1. Kegiatan Peningkatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, realisasi fisik kegiatan 100 % dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 67.300.900,- terealisasi sebesar Rp. 64.900.900,- setara dengan 96,43%.
2. Kegiatan Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), realisasi fisik kegiatan 100 % dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 137.677.400,- terealisasi sebesar Rp. 134.077.400,- setara dengan 97,39%.

#### **VI. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.**

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Bagi Anggota FKDM, realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 40.927.050,- terealisasi sebesar Rp. 40.327.050,- Persentase pencapaian setara dengan 98,53%.

#### **VII. Program Pendidikan Politik Masyarakat.**

1. Kegiatan Operasional Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan Partai Politik, realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dengan dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 17.555.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.255.600,- Persentase pencapaian setara dengan 98,29%.

### **C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategik dan kegiatan antara yang ditargetkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap).

Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir standar pengukuran kinerja, yaitu.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Utama Awal	Rencana Capaian	Realisasi Capaian	Rencana Capaian	Realisasi Capaian	Ket
			Tahun Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	- Kuatnya integritas wilayah	- Lancarnya kegiatan KOMINDA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan politik	- Jumlah lembaga politik	- Jumlah partai politik yang lengkap administrasi	11 parpol	11 parpol	11 parpol	14 parpol	14 parpol	
3. Meningkatkan rasa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	- meningkatnya rasa wawasan kebangsaan	- jumlah siswa yang memahami tentang kebangsaan dan nasionalisme	-	-	-	-	-	
	- Meningkatnya kerukunan umat beragama	- Jumlah masyarakat dari berbagai agama hidup rukun	-	-	-	-	-	
4. Meningkatkan kewaspadaan dini dan ketahanan bangsa	- Meningkatnya kemandirian dan ketertiban di masyarakat	- Jumlah anggota FKDM yang mampu mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban sedini mungkin	-	25 org	25 org	25 org	25 org	
	- Kokah dan kuatnya ketahanan bangsa	- Lancarnya penanganan konflik	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	
5. Membanguna karakter generasi muda yang berakhlak, beradab dan berbudaya	- Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme	- Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya minuman keras dan narkoba	-	-	-	-	-	

## BAB V

# KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN KENDALA

### A. KEBERHASILAN

Berdasarkan diskripsi data diatas memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017 dinyatakan berhasil dan cukup memuaskan karena hal tersebut ditunjukkan dengan Pencapaian fisik seluruh Sasaran Strategis yang ditetapkan mencapai 100 % tetapi realisasi keuangan yang dapat digunakan mencapai 89,17 % dimana ada beberapa kegiatan yang mengembalikan keuangan antara lain sebagai berikut :

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
1	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja telepon	12.000.000,-	2.314.006,-	9.685.994,-
	- Belanja air	6.000.000,-	1.842.265,-	4.157.735,-
	- Belanja listrik	35.600.000,-	8.751.441,-	26.848.559,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>40.692.288,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
2	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja peralatan dan bahan	4.437.900,-	4.437.900,-	-
	- Belanja jasa/ upah kerja	21.600.000,-	19.200.000,-	2.400.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>2.400.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
3	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja pemeliharaan peralatan kantor	6.200.000,-	3.400.000,-	2.800.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>2.800.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
4	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja alat tulis kantor	31.389.100,-	24.948.170,-	6.440.930,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>6.440.930,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
5	<b>Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja Cetak	27.108.500,-	21.834.470	5.274.030
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>5.274.030,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
7	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.080.000,-	2.400.000,-	4.680.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>4.680.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
6	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
-	Belanja bendera, umbul-umbul dan spanduk	6.040.000,-	6.040.000,-	-
-	Belanja modal pengadaan gorden/ taplak meja	6.840.000,-	-	6.840.000,-
-	Belanja modal pengadaan kursi tamu	6.600.000,-	6.600.000,-	-
-	Belanja modal pengadaan televisi	4.670.000,-	4.570.000,-	-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>6.840.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
8	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.670.000,-	156.217.173,-	452.827,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>452.827,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
9	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
-	Belanja jasa/ upah kerja	96.525.000	85.800.000,-	10.725.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>10.725.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
10	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.490.400,-	13.413.544,-	76.856,-
	- Belanja jasa service	4.400.000,-	4.400.000,-	-
	- Belanja pengganti suku cadang	5.609.600	5.609.600,-	-
	- Belanja perpanjangan surat izin mengemudi	1.500.000,-	1.500.000,-	-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>76.856,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
11	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	1.695.000,-	1.695.000,-	-
	- Belanja cetak	320.000,-	320.000,-	-
	- Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000,-	900.000,-	990.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>990.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
12	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>			
	(PA : Drs. JAMILUS)			
	- Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	1.695.000,-	1.695.000,-	-
	- Belanja cetak	320.000,-	320.000,-	-
	- Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000,-	900.000,-	990.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>990.000,-</b>



NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
13	<b>Peningkatan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial</b>			
	(PPTK : ONNITA)			
-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,-	51.300.000,-	1.500.000,-
-	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.800.000,-	1.800.000,-	-
-	Belanja publikasi dan dokumentasi	1.200.000,-	500.000,-	700.000,-
-	Belanja cetak	441.500,-	441.500,-	-
-	Belanja pengandaan	1.759.400	1.759.400,-	-
-	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,-	5.400.000,-	-
-	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,-	3.700.000,-	200.000,-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>2.400.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
14	<b>Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)</b>			
	(PPTK : ZAID YULI)			
-	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	116.100.000,-	113.000.000	3.100.000,-
-	Honorarium pegawai honorer / tdk tetap	12.000.000,-	12.000.000,-	-
-	Belanja publikasi dan dokumentasi	500.000,-	-	500.000,-
-	Belanja cetak	441.500,-	441.500,-	-
-	Belanja pengandaan	935.900,-	935.900,-	-
-	Belanja perjalan dinas dalam daerah	3.200.000,-	3.200.000,-	-
-	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.500.000,-	4.500.000,-	-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>3.600.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM	ANGGARAN	ANGGARAN	SISA
----	-----------------------------	----------	----------	------

	KEGIATAN	DPPA	TERSERAP	ANGGARAN
15	<b>Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Bagi Anggota FKDM</b>			
	(PPTK : ZAID YULI)			
-	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	700.000,-	700.000,-	-
-	Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa	300.000,-	-	300.000,-
-	Honorarium pegawai honorer / tdk tetap	3.100.000,-	3.100.000,-	-
-	Belanja bendera, umbul-umbul dan spanduk	771.000,-	771.000,-	-
-	Belanja publikasi dan dokumentasi	300.000,-	-	300.000,-
-	Belanja cetak	1.207.650,-	1.207.650,-	-
-	Belanja penggandaan	1.118.400,-	1.118.400,-	-
-	Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	3.500.000,-	3.500.000,-	-
-	Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	4.000.000,-	4.000.000,-	-
-	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.030.000,-	14.030.000,-	-
-	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,-	6.600.000,-	-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>600.000,-</b>

NO	KEGIATAN / NAMA PPTK / ITEM KEGIATAN	ANGGARAN DPPA	ANGGARAN TERSERAP	SISA ANGGARAN
16	<b>Peningkatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik</b>			
	(PPTK : JOY TEGUH RAHARJO)			
-	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	5.900.000,-	5.900.000,-	-
-	Honorarium pegawai honorer / tdk tetap	3.600.000,-	3.600.000,-	-
-	Belanja publikasi dan dokumentasi	500.000,-	500.000,-	-
-	Belanja cetak	303.800,-	303.800,-	-
-	Belanja penggandaan	1.401.800,-	1.401.800,-	-
-	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.850.000,-	5.550.000,-	-
	<b>JUMLAH SISA</b>			<b>300.000,-</b>

Keberhasilan ini merupakan cerminan dan berfungsinya seluruh komponen dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar. Dukungan dari tiap-tiap tingkatan ini membuktikan bahwa adanya arahan yang jelas, motivasi yang energik dan ajakan-ajakan yang bersifat positif dari pimpinan, sehingga mampu menggerakkan kerja keras yang ditetapkan bersama melalui Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.

Selain hal tersebut diatas, keberhasilan pencapaian kinerja terutama ditunjang oleh tenaga dan personil yang cukup ulet, disiplin serta memiliki ethos kerja yang baik dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh seksi-seksi yang membidangi sesuai dengan

## **B. KEGAGALAN**

---

Berdasarkan diskripsi data yang ada memperlihatkan bahwa seluruh program / kegiatan yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil dilaksanakan dengan baik.

## **C. KENDALA**

---

Adapun kendala yang dirasakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka operasional pencapaian sasaran strategi adalah :

1. Masih terbatasnya SDM aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik yang handal serta siap-siaga untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Terbatasnya kendaraan operasional dan peralatan serta perlengkapan kantor yang sangat diperlukan dalam rangka mendukung kinerja aparatur dalam menjalankan program – program kegiatan yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bertitik tolak dari kekuatan yang dimiliki, dan peluang yang tersedia, serta mempertimbangkan tantangan dan hambatan, langkah dan upaya pemecahan yang ditempuh antara lain :

1. Penambahan jumlah personil / pegawai untuk kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan kemampuan SDM yang ada dengan mengirimkan kursus, pendidikan dan pelatihan, serta mengikuti berbagai pelatihan rutin berkala.

---

## **BAB VI PENUTUP**

---

### **A. KESIMPULAN**

---

Sebagai bagian akhir dari penulisan LKj ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar telah berhasil melaksanakan kegiatan dan program sesuai rencana, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh sasaran Realisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2018, dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 824.244.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 734.982.519,- atau mencapai 89,17% dengan demikian terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 89.261.931,- atau 10,83%, sedangkan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.089.569.596,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.055.988.778,- setara dengan 96,92% dengan demikian terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 33.580.818,- atau 3,08%.

Untuk lebih dapat meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar ditahun yang akan datang, akan diusahakan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.

### **B. SARAN**

---

Saran yang sebaiknya disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah percepatan realisasi APBD, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan dapat dipersiapkan secara matang. Kepada seluruh Staf di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar diharapkan meningkatkan kinerja dengan selalu mempersiapkan dokumen-dokumen baik yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, baik secara fisik maupun secara administrasinya.